ACCESS
JOURNAL OF ACCOUNTING, FINANCE AND SHARIA ACCOUNTING
Volume 1 No. 1 | 16 – 20 | April 2023 | Program Studi Akuntansi Universitas Bosowa
Available online at https://journal.unibos.ac.id/access

Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Desa Tarengge Kabupaten Luwu Timur

Analysis of Village Financial Management Planning In Tarengge Village, East Luwu District

Ayumita Reskiyani*, Muhtar Sapiri, Indah Syamsuddin
Pogram Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa
Correspondent author email: reskiyaniayumita@gmail.com

Diterima: 14 Januari 2023/Disetujui : 30 April 2023

Abstrak. Jenis survei ini adalah survei kualitatif, dengan fokus pada partisipasi, transparansi pengelolaan keuangan desa di desa Tarenghe, dan sumber informasi survei ini adalah kepala desa, kepala desa, perangkat desa dengan kepala dusun. Hasil data berkaitan dengan analisis Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan going to partisipatif dan transparan. Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa sangat tinggi. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan sangat berbeda, ada yang datang untuk benar-benar membicarakan pembangunan, ada yang datang karena ingin ikut serta melakukan peremajaan. Namun secara keseluruhan, pemerintah desa Tarenghe berusaha menginisiasi pertemuan dengan masyarakat untuk merencanakan kegiatan pengelolaan dana desa. Dalam merencanakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa menjelaskan besaran anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa secara transparan sehingga BPD dan masyarakat memiliki kebutuhan pembangunan saat menyusun rencana yang memasukkan unsur pemerintahan desa dan perizinan dapat sinkron. Besaran estimasi tersebut dikelola oleh Desa.

Kata Kunci: Analisis, Pengelolaan Desa, Keuangan.

Abstract. *This type of survey is a qualitative survey, with a focus on participation, transparancy in village financial management in the village of Tarenghe, and the sources of information for this survey are the village head, villaged head, villaged officials with the hamlet head. The results of the data relate to the analysis of the in Luwu Timur, using a participatif and transparent going to. Village Community Participation in Villaged Fund Budget Management is very high. Public involvement in planning very different, some come to really talk about development, some come because they wanted to participate in as do rejuvenation. Overall, however, the Tarenghe village government is trying to initiate a meeting with the public to plan village fund management activities. Whenplanning village financial management, the village government explains the amount of the budget managed by the village government in a transparent manner so that the BPD and the community have development needs when preparing plans that include elements of village government and permits can be synchronized. The amount of the estimation managed by Village.*

Keywords*: Analysis,Village Management, Financee*

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Keuangan desa ialah keseluruhan hak juga kewajiban desa yang bisa dinilai menggunakan uang, juga seluruh bentuk uang juga barang yang berkaitan saat dilaksanakannya hak juga kewajiban desa (UU No. 6, Pasal 71, No. 1 Tahun 2014). Alokasi dana desa yang signifikan dan peningkatan jumlah dana desa tiap tahun memberikan dampak signifikan terhadap tanggung jawab pengelolaan pemerintah desa, maka pemerintah berkewajiban dalam terjun langsung saat mengawasi penggunaan dana desa (Umar, 2020).

Pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) tingkat desa, merupakan pengelolaan dana desa yang penting sehingga bisa menurunkan tudingan aspek politik pada dana desa yang sudah dianggarkan pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Alokasi Dana Desa (ADD) hendaklah akuntabel juga transparans dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa (DD) tersebut. Dana Desa (DD) dipergunakan dalam mendukung partisipasi penduduk dalam aktivitas pemberdayaan masyarakatdi desa yang ditetapkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang). Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa (DD) berhubungan erat dengan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat (Maddatuang *et al*,2020)

Tambahan PAD Rp4.000.000, Bantuan Keuangan Daerah Rp272.500.000. Rp 9.334.268 untuk Silva di 2019. Anggaran tersebut dialokasikan kepada pemerintah sebesar Rp 789.424.830 untuk pembangunan sebesar Rp 500.299.999. Selanjutnya, pemberdayaan Rp. 345.908.000 dan pembinaan Rp. Untuk 76.654.069. Dibutuhkan dana yang besar untuk mendanai kegiatan pembangunan desa. Setiap desa menerima jumlah tetap Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun untuk tujuan pembangunan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pengelolaan keuangan dana desa pada Desa Tarengge Kabupaten Luwu Timur.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, survei untuk menganalisis rencana pengelolaan keuangan desa Tarenghe di distrik Wotz, yang wajar dan alami dalam konteks waktu dan situasi pertanyaan itu dilakukan dengan berbagai cara. Sesuai dengan kondisi obyektif lapangan. Alasan tersebut dijadikan pedoman agar fokus penelitian sejalan dengan fakta di lapangan, Sugishirono (2012). Proses penelitian yang terlibat melibatkan mengamati sumber, berinteraksi dengan mereka, dan mencoba mencari tahu interpretasi mereka.

Survei dilakukan di kantor di Desa Tarenghe, Kabupaten Wotz, Provinsi Sulawesi Timur. Subyek survei adalah aparat desa dan masyarakat yang tinggal di desa. Waktu penelitian berlangsung sekitar dua bulan.

Ada dua cara untuk mengumpulkan data dalam survei ini:

a) Penelitian kepustakaan Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari, menelusuri, dan meneliti berbagai referensi berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan referensi ilmiah lainnya tentang topik penelitian ini.
b) Survei lapangan. Metode pengumpulan data ini merupakan metode dengan mendatangi langsung ke lokasi/lokasi penelitian dan bertemu dengan subjek penelitian.

Beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah:

a) Pengamatan. Teknik ini dilakukan untuk mengamati secara langsung subjek penelitian dan memperoleh gambaran pertama subjek penelitian,
b) (Interview). Teknik wawancara adalah teknik yang digunakan untuk menciptakan interaksi langsung antara suatu penelitian dengan subjek penelitian. Dalam metode wawancara, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan tentang data yang ingin dikumpulkan.

Teknik Analisis Data sebagai berikut.

a) Reduksi data ialah bentuk analisis yang menajamkan, mengklasifikasikan, mengarahkan, membuang, dan mengorganisasikan data hingga bisa ditarik kesimpulan secara jelas. Reduksi tidak harus ditafsirkan sebagai kuantifikasi data.
b) Penyajian data adalah kegiatan data yang memberikan kesempatan untuk mengumpulkan sekumpulan informasi dan menarik kesimpulan. Format penyajian data kualitatif berbentuk teks naratif (dalam bentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, dan diagram.
c) Kesimpulan adalah hasil analisis berdasarkan tindakan yang bisa dilakukan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Objek Penelitian

Desa Tarengge merupakan sebuah desa yang terletak pada kecamatan Wotu, Sulawesi Selatan. Desa Tarengge dipimpin oleh Desius Rantetana, kepala desa yang berdiri pertama kali pada 26 September 2013. Desa Tarengge terdiri dari beberapa kelurahan: Rantetiku, Muktisari, Tetetalu, dan Roda. Salah satu strategi pelaksanaan program di Desa Tarenghe dimulai dengan mengenalkan tokoh masyarakat, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan anggota dewan desa sehubungan dengan pencarian ide. Dengan mempelajari ide-ide, dan dapat menemukan masalah yang ada di desa dan mengidentifikasi apa yang dibutuhkan komunitas Anda. Selain itu, pemerintah desa Tarenghe mengadakan pertemuan rutin dengan walikota desa. Strategi utama lain pemerintah desa Tarengge (Pemdes) adalah program pembangunan partisipatif yang melaksanakan perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Selain melaksanakan pembangunan partisipatif dan upaya lain untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, Pemerintah Desa (Pemdes) memberikan akses pelayanan publik dan informasi desa secara mudah dan transparan bagi seluruh masyarakat, merupakan sistem pemerintahan yang terbuka.

Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tarengge

Menurut Pasal 71 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang dan berkaitan dengan segala pelaksanaannya dalam bentuk uang dan barang. Terkait hak dan kewajiban desa. Selain itu, ayat (2) mengatur bahwa adanya hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 93 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penulis memaparkan analisis tentang rencana keuangan desa yang di uraikan, melalui pemahaman di bawah ini:

a) Partisipatif

Baik dicapai dari pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan berkembangnya cara pandang baru tentang partisipasi masyarakat. Dengan kata lain, hal itu dicapai tidak hanya dengan berpartisipasi dalam komunitas sebagai penonton, tetapi juga dengan berpartisipasi sehingga orang-orang yang memiliki semangat kerja dapat terlihat bersama. Dengan perkembangan yang ada. Masyarakat desa Tarenghe terlibat dalam pengembangan. proses perencanaan pengelolaan keuangan desa. Menurut Kepala Desa Tarenghe,

> "Keterlibatan masyarakat Desa Tarengge dalam program pembangunan sangat tinggi. Hal ini perlu dilakukan karena pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan memudahkan pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan. Hal ini karena seluruh pihak dapat mengidentifikasi dimana letak permasalahan masyarakat."(informan RT pada 23/06/2022).

Perencanaan dengan pendekatan, partisipasi masyarakat menunjukkan persepsi pemerintah bahwa masyarakat tidak hanya menjadi sasaran atau subjek yang mengetahui hasil pembangunan, tetapi juga merupakan entitas atau entitas pembangunan yang andal dalam segala hal perkembangan.

"Partisipasi masyarakat desa Tarenghe dalam pembangunan desa terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok sukarela dan kelompok kedua adalah orang yang ikut serta tetapi mengharapkan upah. Mengakui tanggung jawab sebagai diri sendiri dan sebagai makhluk sosial, hidup untuk saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kelompok kedua ini sudah lama ada dan merupakan komunitas dari semua desa.Beberapa orang yang hanya mementingkan egonya yang tinggi karena tidak memiliki landasan nilai moral dan kebiasaan yang berakar.." (Informan SY pada 23/07/2022).

> "Pemerintah Desa Tarenghe selalu memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses konsultasi, baik secara lisan maupun untuk membahas anggaran yang digunakan untuk kegiatan pembangunan desa Tarengge. Kegiatan ini sangat bermanfaat dan juga sebagai bentuk pengawasan masyarakat dalam mengelola dana desa." (Informan IH pada 24/06/2022)

Informasi yang didapatkan dari IH menunjukkan masyarakat mendukung etika yang baik dari pemerintah desa Tarengge untuk melibatkan masyarakat dalam mengembangkan isu pengelolaan anggaran desa. Rencana tersebut merumuskan format yang menggunakan anggaran dana desa untuk melaksanakan kegiatan mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan secara cermat kendala, dan mencapai maksud dan tujuan program dana desa sesuai dengan yang diharapkan.

Keterlibatan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pengelolaan anggaran berpengaruh besar. Keterlibatan penduduk dalam pembangunan berbeda-beda, ada yang bmembahas pembangunan, ada yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, dan adapun

mempelihatkan diri. Namun secara keseluruhan, pemerintah desa Tarenghe akan memulai pertemuan dengan penduduk untuk merencanakan kegiatan pengelolaan DD. Keterlibatan penduduk kedepan tentunya sangat ditunggu-tunggu agar dapat bersinergi dengan pembangunan desa Tarenghe.

b) Transparansi

Transparansi menurut Solekhan (2012) dalam Hotimah (2017) dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung bisa diterima oleh mereka yang memerlukan. Informasi harus mampu dimengerti juga diawasi. Transparansi ialah pelayanan publik haris bersikap terbuka, mudah juga bisa terakses oleh seluruh pihak yang memerlukan serta disediakan secara memadai juga mudah dipahami (Mahmudi 2015). "Transparansi dalam perencanaan maupun pelaksanaan di dalam pelaksanaan kegiatan kita membuat semacam pengumuman atau papan informasi, dalam perencanaan kita berikan kepada masyarakat dananya dana dari apa kemudian besaran dana berapa, volume yang di capai berapa, pekerjaannya apa, waktunya berapa hari dan sebagainya kita tunjukkan dengan papan nama untuk satu kegiatan. Kalau untuk kegiatan keseluruhan semuaprogram desa dari januari sampai desember kita membuat baliho yang akan dilihat seluruh masyarakat." (Irforman RT pada 23/06/2022). Hasil wawancara dengan informan RN menunjukkan bahwa di desa Tarengge, ketika merencanakan kegiatan pengelolaan keuangan, serta bagaimana prosedur. Kegiatan tersebut dirancang. Banyak prosedur telah didiskusikan dan disetujui dalam kerjasama dengan masyarakat. Kemudahan akses informasi milik pemerintah menjadi salah satu perhatian masyarakat saat ini. Akuntabilitas (Accountability) ialah kewajiban agar memberi pertanggung jawaban ataupun menjawab. serta menerangkan kinerja juga perbuatan seseorang badan hukum, pimpinan ataupun organisasi pada pihak yang mempunyai hak ataupun berwenangan dalam memintaketerangan ataupun pertanggungjawaban (Syamsuddin, 2022).

Prinsip akuntabilitas tersebut perlu dilaksanakan dalam pemenuhan kepuasaan masyarakat, sehingga dibutuhkan pihak pemegang yang dapat dipercayai untuk diberikan tanggun jawab melalui penyajian serta pemberian laporan berhubungan pada keuangan desa pada kelompok sasaran dalam hal ini yakni masyarakat (Jumarding dkk, 2021)

> "Saat merencanakan penggunaan anggaran desa, keterbukaan pelayanan kepada pemerintah desa juga sangat baik, dan pemerintah kota bertanya-tanya berapa anggaran yang ada, akan digunakan untuk apa, dan anggarannya bisa di lihat sendiri banyak biayanya yang digunakan. Hal ini memungkinkan pemerintah kota untuk memantau proses kegiatan pemerintah di desa Tarengge." (Irforman BD pada 24/06/2022)

Pengelolaan keuangan desa Tarenge dijelaskan secara jelas kepada masyarakat, memberikan mereka pengawasan langsung terhadap format anggaran yang dipakai pemerintah untuk pembangunan. Rancangan menerapkan besaran anggaran yang dipakai oleh pemerintah desa untuk memungkinkan BPD dan masyarakat memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan mereka ketika membuat rencana yang memasukkan unsur-unsur pemerintah desa. Koordinasi dengan anggaran yang dikelola oleh desa Tarenge.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan keuangan Desa Tarenghe meliputi penggunaan DD (Dana Desa) untuk penguatan masyarakat Desa Tarenghe. Tentang pengelolaan keuangan desa sudah diatur dalam UU No. 113 Tahun 2014, dan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan hingga penganggaran, mekanisme permintaan pembayaran, pemantauan dan pertanggungjawaban. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan sifnifikan terhadap pengelolaan keuangan Desa. Akuntabilitas, Tranparansi dan Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, H., Palisuri, P., Hernita, H., Syarifuddin, S., Syamsuddin, I., & Herman, R. (2021, December). Keberlanjutan usaha mikro dan kecil pedesaan melalui pemberdayaan Sumberdaya lokal. In Seminar Nasional Hasil Penelitian &Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M) (pp. 480-485).

Andriani, Matia. 2019. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Journal of Accounting, Finance and Auditing. Vo. 1, No. 2 (2019).

Fahri, Syaeful. 2020. Akuntabilitas, Efektivitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada: Desa di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen). Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Yayasan Keluarga Pahlawan Negara", Yogyakarta.

Ghozali, I. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS. 25

Edisi 9. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Jaa, Emilianus. 2019. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Gunung Turi Kabupaten Manggarai Timur). Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi. Vol. 7, No. 1, April 2019.

Jumarding, A., Mane, A. A., & Karim, A. (2021). Desa wisata menunjang transformasi ekonomi nasional di kabupaten Enrekang. Nas Media Pustaka, Makassar.

Maddatuang, B., Sabara, Z., Wekke, I. S., & Karim, A. (2020). Langkah Mewujudkan Insan Cita Pandangan Lintas Disiplin. Penerbit Qiara Media.

Mardiasmo. 2014. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Lima. Cetakan Keempat.

Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Napisah, Lilis Saidah., dan Cecep Taufiqurachman. 2020. Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publikdan Transparansi di Kabupaten Bandung. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Vol..6, No. 2, Juli 2020.

Nurhidayanti, S., Galib, M., & Jumarding, A. (2022). Pengaruh Penerapan Peraturan DJP Terkait Kepatuhan WPOP Dalam Pelaporan SPT Tahunan Secara Elektronik Pada KPP Pratama Makassar Selatan. Economics Bosowa, 8(001), 1-10.

Permatasari, Intan., Endah Susilowati dan Oryza Tannar 2021. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadpa Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel

Intervening. JIMEA. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan

Akuntansi. Vol. 5, No. 2, 2021.

Puspitasari, S., Mane, A., & Syamsuddin, I. (2021). Pengaruh Motivasi Dan Hasil Belajar Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Daring (Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Universitas Bosowa). Economics Bosowa, 7(003), 216-227.

Rabiyah, U., Suryani, A., & Karim, A. (2021). The Effect of Awareness, Fiscus Services and Taxation Knowledge on Taxpayer Compliance At Madya Makassar Kpp. International Journal of Innovation Scientific Research and Review, 3(1), 797-799.

Sari, Melisa Eka., Fefri Indra Azra., dan Salma Taqwa. 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. Jurnal Eksplorasi Akuntansi. Vol. 1, No. 3, Seri E, Agustus 2019.

Sukmawati, Fitir. 2019. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal dan UMKM. Vol. 2, No. 1, Juni 2019.

Syamsuddin, I., Muhammad, P. N., & Karim, A. (2022). Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020. YUME: Journal of Management, 5(2), 170-177.

Syukur, A., Novianti, A. S., & Karim, A. (2021). Financial Ratio Analysis of Pt. Semen Tonasa Before and After Joining The Semen Indonesia Group. International Journal of Engineering Technology Research & Management, 5(1), 11-17.

Tahir, M. T. (2021). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kas Pada Pt Shoyumu Makmur Sinergy Di Makassar. Economics Bosowa, 6(005), 25-31.

Tang, M., Gazali, A., & Jumarding, A. (2021). Strategi Peningkatan Produksi Gula Semut Di Desa Mangkawani Kabupaten Enrekang. J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 1(7), 1305-1310.

Ultafiah, Weny. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.

Zulfadzal. 2020. Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Di Gampong Lampeudeu Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie). Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar – Raniry, Banda Aceh.